

ABSTRAK

Diversi merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan melakukan pengucilan pelaku dari konteks kehidupan sosialnya, pada dasarnya diversi mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana melalui diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan Peraturan pengganti Undang – Undang, dengan spesifikasi deskriptif analitis data yang dikumpulkan dengan data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah dilakukan namun belum secara maksimal dapat dicapai. Hal tersebut disebabkan karena masih dibutuhkannya waktu penyesuaian dengan aturan yang baru berlaku, guna memenuhi kelengkapan infrastruktur penunjang dan pemerataan sumber daya manusia yang terlatih dan handal di setiap lembaga peradilan diberbagai daerah diseluruh Indonesia, khususnya yang menangani tindak pidana anak. Terikat dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan hukum mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system* yang dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interpendensi) dengan lingkungannya sehingga upaya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat diwujudkan. (2) Hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah kurang berjalannya sistem perlindungan anak dalam setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. (3) Solusi yang bisa diambil dalam mengatasi hambatan pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya perlunya pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur secara jelas dan terperinci sehingga tidak menimbulkan kerancuan untuk penerapan keadilan restoratif dan diversi, perlunya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan masyarakat yang terlibat secara langsung dalam Penerapan keadilan restorative, perlunya diupayakan peningkatan sarana dan prasarana dan perlunya keterlibatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun lembaga/organisasi yang memiliki perhatian pada permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum untuk ikut meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya upaya diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi

ABSTRACT

Diversion is a constructive effort to rebuild social relations that have been damaged by criminal acts, compared to exclusion of perpetrators from the context of their social life, basically diversion has relevance to the purpose of punishment for children. In general, the purpose of punishment consists of efforts to protect the community on the one hand and protect (the perpetrators) on the other. The purpose of this thesis research is to study and analyze the implementation of keadilan restoratif in the Criminal Justice System through diversion at the Semarang Public Prosecutor's Office.

The method used is juridical empirical, which examines the implementation of regulations in lieu of laws, with descriptive analytical specifications of data collected with primary data from field research and secondary data from literature studies.

The results of this study are: (1) Implementation of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System through Diversion at the Semarang City District Attorney has been carried out, but the results are not optimal. This is due to the fact that time is needed with the new regulations, in order to fulfill the complete supporting infrastructure and equitable distribution of trained and reliable human resources in every judicial institution in various regions throughout Indonesia, especially those for child crimes. Being bound in the criminal justice system is expected to work together in realizing the law to realize justice and truth and can form an integrated criminal justice system which in its motion will always experience an interface (interaction, interconnection, and interdependency) with the environment so that efforts to protect children are related to law. can be realized. (2) The obstacle in the implementation of restorative justice in the Juvenile Criminal Justice System through the diversion of the Semarang City Public Prosecutor's Office is the ineffectiveness of the child protection system in every child case related to the law. (3) Solutions that can be taken in overcoming obstacles to the implementation of restorative justice, such as the need for a new diversion process, procedures, and coordination for the implementation of diversion are regulated by Government regulations and other implementing regulations for the application of restorative and diversion justice, the need to improve the quality of law enforcement officers and communities who are directly involved in the application of restorative justice, the need to improve facilities and infrastructure and the need for communication by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) as well as institutions / organizations that are concerned with child issues related to law participate in increasing public legal awareness regarding the importance of diversion efforts to achieve restorative justice.

Keywords: *Keadilan restoratif, Juvenile Criminal Justice System, Diversion*